



## **ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN AUKUS DALAM MENJAGA STABILITAS INDO-PASIFIK 2021-2024**

**Gina Natasya**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi,  
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pasca pembentukan pakta pertahanan AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) tahun 2021 dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik periode 2021-2024. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen primer (pernyataan resmi Kemenlu RI) dan sekunder (jurnal dan laporan), penelitian ini mengacu pada teori Neorealisme Struktural Kenneth Waltz dan konsep security dilemma serta hedging strategy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia merespon AUKUS melalui pendekatan bebas aktif yang adaptif, menggabungkan diplomasi normatif (pernyataan keprihatinan proliferasi nuklir, working paper “Nuclear Naval Propulsion” di NPT 2022), penguatan sentralitas ASEAN Outlook On the Indo-Pacific (AOIP), serta strategi hedging berupa kritik terhadap potensi arms race di satu sisi dan peningkatan kerjasama pertahanan bilateral dengan Australia di sisi lain. Kebijakan ini efektif memitigasi dilema keamanan regional dengan menjaga otonomi strategis Indonesia dan mendorong pendekatan inklusif berbasis ekonomi dan hukum internasional (UNCLOS 1982). Simpulan penelitian menyatakan ASEAN menjadi instrumen utama Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan di tengah rivalitas kekuatan besar.

**Kata Kunci:** Kebijakan Luar Negeri Indonesia, AUKUS, Hedging Strategy, Security Dilemma, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Neorealisme.

### **PENDAHULUAN**

Kawasan Indo-Pasifik merupakan wilayah strategis yang membentang dari Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik, menjadi pusat

lalu lintas maritim global dan sumber daya alam yang melimpah. Kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok telah mengubah dinamika kekuatan di kawasan ini, memicu respon Amerika

Serikat untuk tetap mempertahankan pengaruhnya. Salah satu respon yang paling signifikan adalah pembentukan pakta pertahanan trilateral AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) pada 15 September 2021. Pakta ini mencakup transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia, yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kawasan, tetapi justru menimbulkan kekhawatiran akan perlombaan senjata dan *security dilemma* di kawasan Indo-Pasifik.

Pembentukan AUKUS menimbulkan *security dilemma* keamanan karena upaya satu pihak untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya di anggap sebagai ancaman oleh pihak lain, khususnya Tiongkok. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan dan sebagai anggota ASEAN, AUKUS menimbulkan implikasi langsung terhadap keamanan Laut Natuna Utara dan stabilitas regional secara keseluruhan. Indonesia merupakan negara dengan politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan hubungan dan kekuatan besar tanpa terjebak dalam rivalitas blok.

Indonesia merespon AUKUS dengan sikap hati-hati namun tetap aktif. Pada September 2021, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keprihatinan mendalam terhadap potensi perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan, sekaligus menekankan pentingnya komitmen non-proliferasi nuklir dan penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Selanjutnya Indonesia menggunakan jalur diplomasi multilateral melalui PBB (termasuk *working paper "Nuclear Naval Propulsion"* tahun 2022), keketuaan ASEAN tahun 2023 serta ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) untuk menjaga

sentralitas ASEAN dan mendorong pendekatan inklusif berbasis kerjasama ekonomi.

Penelitian ini relevan karena menjelaskan bagaimana Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif dan strategi *hedging* ditengah rivalitas kekuatan besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan prinsip politik bebas aktif berperan pasca pembentukan AUKUS dalam menjaga stabilitas keamanan regional Indo-Pasifik tahun 2021-2024. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan terkait kebijakan luar negeri Indonesia pasca pembentukan AUKUS dalam upaya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguraikan, menafsirkan, dan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks dinamika keamanan regional Indo-Pasifik (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan mendeskripsikan secara rinci sikap dan kebijakan Indonesia terhadap AUKUS serta menganalisisnya menggunakan kerangka teori yang relevan. Penelitian dibatasi pada periode tahun 2021-2024. Batas waktu ini dipilih karena AUKUS diumumkan pada September 2021, Indonesia memimpin ASEAN pada 2023, dan tahun 2024 menjadi periode akhir untuk melihat konsistensi serta adaptasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah seperti pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, pidato Presiden Joko Widodo, serta dokumen

diplomasi Indonesia di forum ASEAN dan PBB. Sedangkan data sekunder melalui jurnal ilmiah, buku, laporan Lembaga, dan berita resmi terkait AUKUS dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dengan mengumpulkan literatur akademik dan publikasi internasional. Dokumentasi melibatkan arsip resmi, pernyataan pemerintah, dan pemberitaan kredibel terkait kebijakan Indonesia terhadap AUKUS periode 2021-2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan AUKUS merupakan respon Amerika Serikat terhadap peningkatan pengaruh dari Tiongkok. Transfer teknologi kapal selam nuklir kepada Australia memicu kekhawatiran proliferasi nuklir dan dilema keamanan di kawasan. Indonesia berada pada posisi sulit karena secara geografis dekat dengan potensi konflik di Laut Natuna Utara sekaligus memiliki kepentingan menjaga stabilitas maritim.

Prinsip dasar dan evolusi kebijakan Indonesia dari tahun 2021-2024 Indonesia konsisten menerapkan politik bebas aktif, sentralitas ASEAN, dan AOIP. Pada tahun 2021 Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam terkait perlombaan senjata dan menekankan kewajiban non-proliferasi nuklir. Tahun 2022 melalui pengajuan *working paper* "Nuclear Nava Propulsion" di PBB Indonesia mendorong pengawasan ketat dari IAEA (*International Atomic Energy Agency*) terhadap material nuklir untuk propulsi kapal selam. Di tahun 2023 Indonesia terpilih sebagai ketua ASEAN. Indonesia mengimplementasikan AOIP (*ASEAN Outlook On The Indo-Pacific*) dengan memperkuat dialog 2+2 dengan Australia, dan mendorong adanya kerjasama ekonomi melalui *ASEAN Indo-Pacific Forum* (AIPF). Pada tahun 2024 Indonesia melanjutkan pendekatan *hedging* dengan memperkuat kerjasama

pertahanan bilateral dengan Australia sambil tetap menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap UNCLOS 1982 serta SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*) yang merupakan traktat perjanjian yang menetapkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

Strategi *hedging* (lindung nilai) merupakan pendekatan yang sangat populer di kalangan negara-negara menengah di kawasan Indo-Pasifik untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik tanpa harus memilih satu pihak secara eksplisit. *Hedging* berbeda dari *balancing* (penyeimbang) yang konfrontatif dan *bandwagoning* (mengikuti pihak kuat). *Hedging* menggabungkan elemen kerjasama dan penolakan secara simultan untuk memaksimalkan otonomi dan meminimalisir risiko (Azzqy & Awal, 2023; Birgitta et al., 2025).

Indonesia menerapkan *hedging* multidimensi yang mencakup tiga pilar utama. Pertama Indonesia menerapkan diplomasi normatif dan *soft balancing*, Indonesia secara konsisten mengkritik aspek-aspek AUKUS yang berpotensi merusak stabilitas kawasan pada 2021, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan lima poin keprihatinan resmi, terutama terkait Risiko perlombaan senjata dan proliferasi nuklir. *Working Paper* yang diajukan pada tahun 2022 ke konferensi review NPT di PBB merupakan bentuk langkah *soft balancing* karena tidak menyerang AUKUS secara langsung, melainkan menutup celah hukum dalam rezim non-proliferasi nuklir melalui mekanisme multilateral, tujuannya adalah mencegah kemungkinan buruk yang dapat memicu *security dilemma*. Selanjutnya Indonesia melakukan kerjasama bilateral pragmatis dengan anggota AUKUS yaitu Australia. Contoh nyata adalah pembaruan *Defense Cooperation Agreement* dan penyelenggaraan pertemuan 2+2 antara Menteri Luar

Negeri dan Menteri Pertahanan pada Februari 2023. Kerjasama ini mencakup bidang pertahanan, keamanan siber, serta rantai pasok mineral kritis (nikel Indonesia dan lithium Australia). Pendekatan ini menunjukkan adanya *selective engagement* Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Australia sebagai tetangga strategis tanpa memberikan dukungan politik terhadap AUKUS. Selanjutnya yang dilakukan Indonesia adalah melakukan penguatan sentralitas ASEAN dan AOIP sebagai *hedging* institusional. ASEAN menjadi perasai kolektif bagi Indonesia dan melalui keketuaanya di ASEAN 2023, Indonesia mendorong implementasi AOIP yang menekankan inklusivitas, kerjasama ekonomi, dan penghindaran rivalitas militer. Peluncuran AIPF juga merupakan upaya konkret untuk mengalihkan focus dari isu keamanan militer AUKUS ke isu pembangunan dan konektivitas. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menghindari polarisasi kawasan sambil tetap mempertahankan ASEAN sebagai platform utama dalam pengambilan keputusan regional.

Dalam perspektif Neorealisme Defensif yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, negara tidak perlu mencari dominasi (*offensive realism*), melainkan cukup mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*) melalui penyeimbang yang rasional. *Hedging* Indonesia merupakan manifestasi paling rasional dari neorealisme defensif di tengah struktur anarki Indo-Pasifik, Indonesia tidak meningkatkan kekuatan militer secara agresif, melainkan menggunakan diplomasi dan norma internasional (UNCLOS 1982, NPT, SEANWFZ), dan institusi regional untuk mengelola risiko. *Hedging* Indonesia bersifat proaktif-defensif karena tetap proaktif mengajukan inisiatif normative di PBB dan memimpin ASEAN, tetapi di sisi lain tetap defensif menjaga otonomi

dengan tidak bergabung dalam aliansi militer manapun.

## **SIMPULAN**

Kebijakan luar negeri Indonesia pasca pembentukan AUKUS tahun 2021 telah berhasil menjalankan prinsip bebas aktif secara adaptif dan kontekstual dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik periode 2021 – 2024. Melalui pendekatan *hedging* multidimensi, Indonesia secara simultan menyuarakan keprihatinan normatif terhadap risiko proliferasi nuklir dan potensi *arms race*, mendorong penguatan sentralitas ASEAN melalui ASEAN outlook on the Indo-Pacific (AOIP), serta memperkuat kerjasama bilateral pragmatis dengan Australia tanpa terjebak dalam rivalitas blok kekuatan besar. Kebijakan ini mencerminkan manifestasi neorealisme defensif yang rasional, di mana Indonesia tidak hanya mempertahankan otonomi strategisnya, tetapi juga aktif mempromosikan arsitektur regional yang inklusif berbasis hukum internasional (UNCLOS 1982) dan kerja sama ekonomi. Dengan menjadikan ASEAN sebagai instrument utama, Indonesia berhasil memitigasi *security dilemma* di kawasan, menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan stabilitas Indo-Pasifik secara keseluruhan. Pendekatan ini membuktikan bahwa politik bebas aktif tetap relevan dan efektif sebagai pedoman bagi Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ketentuan umum penulisan daftar pustaka:

Azzqy, A. A. R., & Awal, S. (2023). Menjawab Pembentukan Aukus Di Kawasan Asia Pasifik Menggunakan Prinsip Bebas Aktif Indonesia. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 251–266.

Aliansi Trilateral Aukus Terhadap. *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1),

Birgitta, E., Internasional, J. H., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Sriwijaya, U. (2025). *Strategi Hedging Indonesia Dalam Merespons Dinamika Aukus Versus China*.

Cheema, S. (2021). AUKUS : Analysis of its Claimed Objectives in Asia-Pacific. *CISS Insight*, IX(2), 86–101.

Citriadin, Y. (2020). Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif. In *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (pp. 201–218).

Darmawan, A. B. (2018). Perubahan Perilaku Politik Luar Negeri Tiongkok terhadap Isu Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 84.

Delanova, M. O. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), 259–285. H

Ekonomi, P. (2023). Title. *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48.

Nurfauzi, A., Lampita, F., & Mahendra, M. R. (2022). The Impact of AUKUS in Indonesian Perspective: Regional Military Balance and Security Dilemma. *Jurnal Sentris*,

Perdana, D. B., Ramasandi, R. D., & Setiawan, M. E. (2021). Posisi Indonesia Terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) Dalam Perspektif Neorealisme. *Defendonesia*, 5(2), 33–45.

Prakoso, L. (2021). AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*,

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). Analisis Data.Pdf. In *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*.

Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (n.d.). *No*

Saputro, B., Ulung, A. K., Abdurrohimi, M., Ilmu, S., Internasional, H., Indonesia, S. N., & Selatan, J. (2024). Kompleks Keamanan Regional Indo-Pasifik Sebagai Faktor. *Journal Publicuho*,

Suryanti, B. T. (2021). Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(1), 29–35.

Wicaksono, B. H. (2024). Pengaruh